

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan kurnia-Nya, rencana Strategis dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berhasil menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Priode Tahun 2018 – 2023

Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Strategis diharapkan dapat memberikan arah, Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Kesejahteraan masyarakat yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dari sini dapat dikatakan, Renstra menjadi pedoman dasar dalam menyusun Rencana Kinerja tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Kami sangat menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rancangan Renstra ini sehingga sasaran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan diwaktu yang akan datang.

Pelaihari, Oktober 2018

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. WIYANTO,M.Si
Nip.19610313 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI II

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial 9

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial..... 15

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Sosial..... 33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial..... 38

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL 40

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial 40

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 42

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 44

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 45

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 46

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN 47

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

4.2 Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial 47

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL . 49

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 53

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN . 57

BAB VIII: PENUTUP 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

```

graph TD
    A[Renstra-KL dan Renstra SKPD Provinsi] --> B[Perumusan visi dan misi SKPD]
    A --> C[Perumusan Tujuan]
    A --> D[Perumusan sasaran]
    E[Penelaahan RTRW] --> B
    F[Penelaahan K/LHS] --> B
    G[Analisis Gambaran pelayan SKPD] --> C
    H[SPM] --> G
    I[Pengolahan data dan informasi] --> G
    J[Perumusan isu-isu strategis berdasarkan hasil] --> B
    J --> C
    J --> D
    B --> K[Perumusan Strategi dan kebijakan]
    C --> L[Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator berdasarkan rencana program prioritas RPJMD]
    D --> M[Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD]
    K --> L
    L --> M
    M --> N[Rancangan Renstra-SKPD]
    N --> O[Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda]
  
```

Rancangan Renstra-SKPD

- Pendahuluan
- Gambaran pelayanan SKPD
- Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi
- visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan
- rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator
- indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

b. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan NomorTahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
20. Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
24. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: No. 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Peraturan

c. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut disusun dengan tujuan sebagai acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan dibidang Kesejahteraan sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurung waktu priode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rancana Strategis Dinas Sosial priode 2018-2023.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurung waktu priode 2018-2023

4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk memahami, menyesuaikan dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

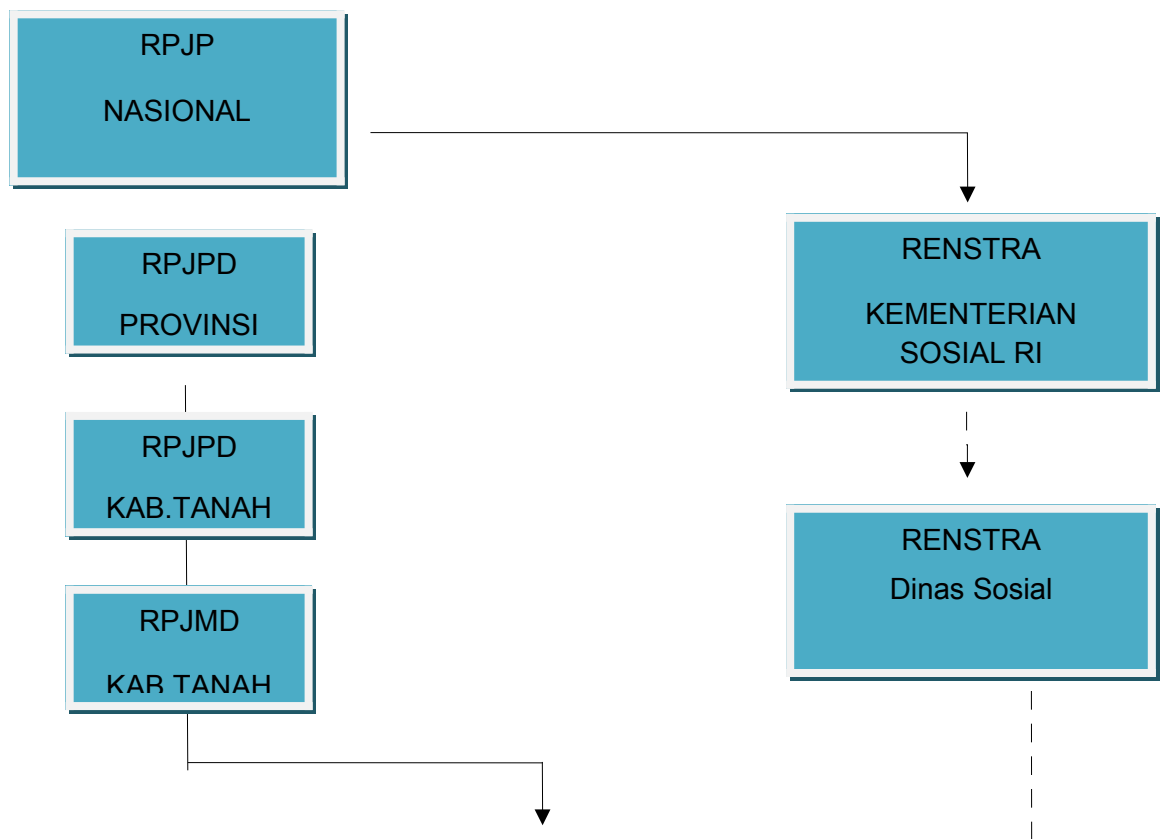
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan (2019-2023) Dinas Sosial Provinsi Kal-sel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023,

dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan di bidang penanganan Kemiskinan Nasional, Provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Adapun skema hubungan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



d. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga,

telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini mengemukakan program Dinas Dinas Sosial yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Sosial yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima(5) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab. VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial

1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yakni :

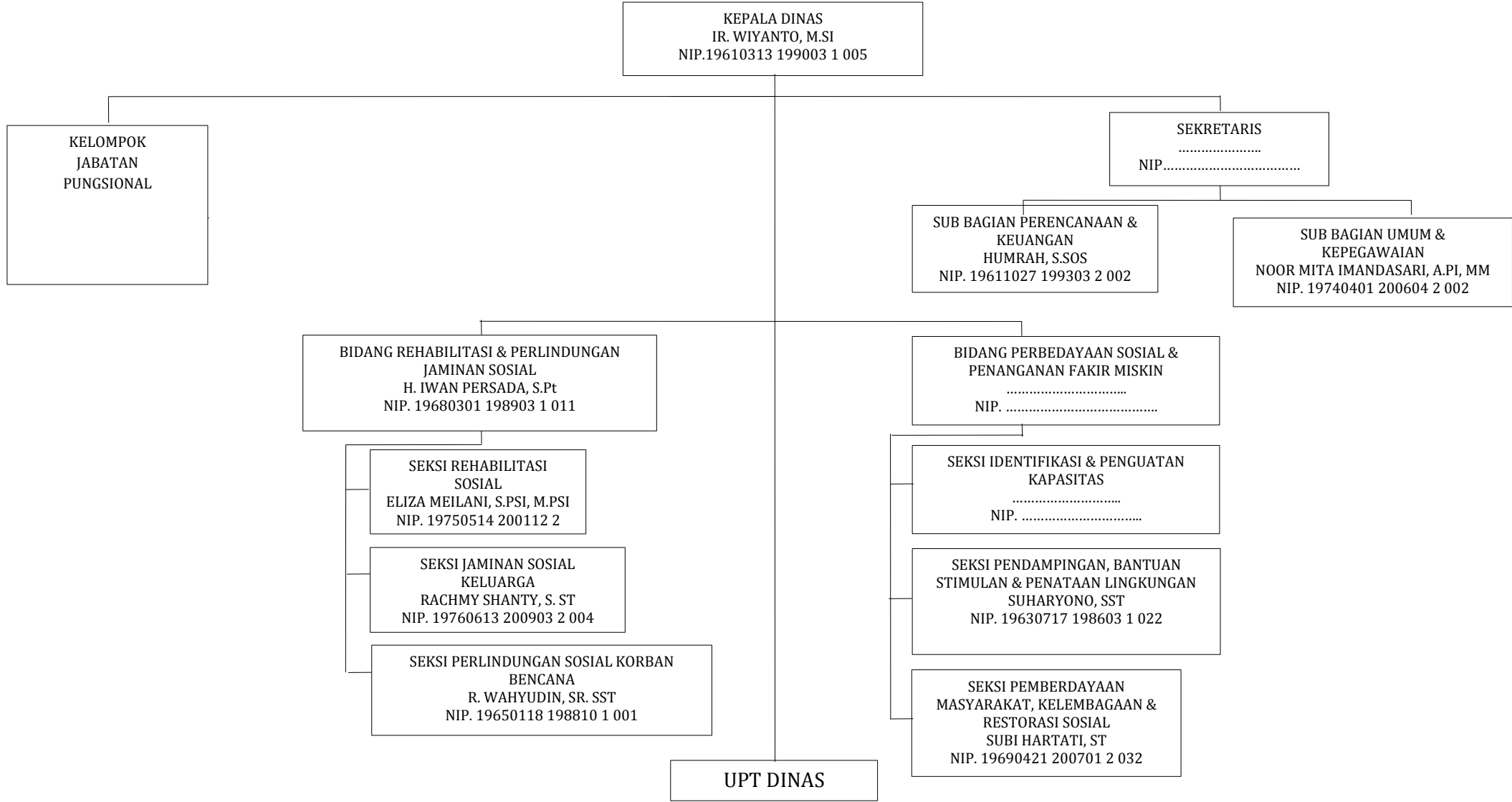
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2 . Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUTBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 2016



Penjelasan Bagan :

Struktur Organisasi SKPD ditunjukkan untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial
 - c. Seksi perlindungan korban bencana
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Identifikasi dan penguatan kapasitas
 - b. Seksi perlindungan bantuan stimulan dan pemantauan lingkungan
 - c. Seksi Pemberdayaan masyarakat , Kelembagaan dan Restorasi sosial.

4.UPTD

- Latihan Belajar Kerja (LBK)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris serta 2 Kasubbag dan 2 kepala Bidang yang masing – masing dibantu 3 orang kepala seksi. Kepala Dinas Sosial adalah Eselon II, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah eselon III serta Kasi dan Kasubbag adalah eselon IV dan masing masing kasubbag dan kasi dibantu oleh tenaga pelaksana.

2. Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Adapun Uraian Tugas Dapat dilihat dari Tabel berikut:

**Tabel 2.1 Uraian Tugas
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut**

No	Unsur Organisasi	Uraian Tugas
1	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan kebijakan umum Bupati dan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja 2. Mengkoordinasikan , mengawasi danmengendalikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dilingkungan dinas sosial didaerah 4. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan bidang sosial dan daerah 5. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta personil dilingkungan dinas sosial 6. Merumuskan jumlah dan mutu serta jenistenaga yang dibutuhkan dengan tugas dibidang sosial 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepada Bupati yang diambil dibidang tugasnya . 8. Membuat laporan pertanggung jawaban (LAKIP) kepada Bupati 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberkaitan dengan bidang sosial sesuai petunjuk Bupati
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas; 2. Memberikan dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; 3. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana; 4. Melaksanakan koordinasi, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kedinasan; 6. Pengelolaan barang milik daerah dan Negara; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan jaminan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak diluar Panti dan /atau lembaga; 2. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di panti dan / atau lembaga; 3. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial

		<p>dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga;</p> <ol style="list-style-type: none">4. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga;5. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam;6. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;7. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;8. mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah daerah Provinsi;9. mengelola data pelayanan sosial korban penyalagunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi;10. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial diluar panti dan /atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan11. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan kebijakan teknis pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan sebagaidasar dan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil,serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dankomunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; lembaga

		<p>penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p>
--	--	--

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 1 (satu) tahun transisi. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 19 orang.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 2.2 .1 Sumber daya manusia menurut Kalasifikasi pendidikan, pangkat, golongan, serta jumlah pejabat

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN									GOL/PANGKAT				DIKLAT STRUKTURAL			
NAMA JABATAN	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SI	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan perlindungan jaminan sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Bidang Pemberdayaan dan penanganan fakir Miskin	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Seksi Rehabilitasi Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Seksi Jaminan Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Seksi Perlindungan sosial korban bencana	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Seksi Identifikasidan penangananKapasitas	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seksi Perlindungan bantuan Stimulandan penataan lingkungan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan,dan RestorasiSosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Staf Fungsional Umum	10	-	2	-	7	-	-	-	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-
Non PNS (PTT)	14	-	3	3	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	33	3	5	3	11	-	-	1	9	3	-	2	-	9	2	-	1	-	4

Dinas sosial Kabupaten Tanah Lautberdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PERALATAN DAN MESIN TIK

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	DATA PERALATAN DAN MESIN (COMPUTER)							Keterangan
				Spesifikasi/Identitas Barang							
				Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Asal usul	Harga Barang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	10	Azzura / Z2 VY	Core i3	Campuran	2017	1	6.450.000	PC Unit/komputer	
2	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	11	Azzura / Z2 VY	Core i3	Campuran	2017	1	6.450.000	PC Unit/komputer	
3	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	17	INTEL / 15 Sandybryge	61, harddisk- 500 seagate baracuda	Campuran	2011	1	8.266.000	-	
4	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	19	LG / Hitam / -	18,5"	Campuran	2013	1	8.000.000		
5	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	20	LG / -	18,5"	Campuran	2013	1	8.000.000		
6	02.06.03.02.02	Laptop	3	Acer / Aspire 23-451	Core i3	Campuran	2017	1	5.650.000	Laptop/ Hitam	
7	02.06.03.02.02	Laptop	4	Acer / Aspire 23-451	Core i3	Campuran	2017	1	5.650.000	Laptop/ Hitam	
8	02.06.03.02.02	Laptop	6	Toshiba / Satelit M840, core i7	Core i3	Campuran	2013	2	14.750.000	Hasil hibah dari Pusat	
9	02.06.03.02.03	Note Book	1	Toshiba / 8824 8387 W/Pink/13	13"	Campuran	2009	1	18.000.000	Komputer Notebook	
10	02.06.03.02.03	Note Book	2	Toshiba / 8824 8387 W/Pink/13 inc	13"	Campuran	2009	1	18.000.000	Komputer Notebook	
11	02.06.03.02.03	Note Book	3	TOSHIBA / L745	14"	Campuran	2011	1	9.300.000		
12	02.06.03.02.03	Note Book	4	Toshiba / Satellite/P745	14"	Campuran	2012	1	10.703.000		
13	02.06.03.02.03	Note Book	5	Toshiba / Satellite L510	13"	Campuran	2010	1	9.350.000	Penilaian 2015	
14	02.06.03.05.02	Monitor	1	LG / LED 20M 37	49/ 19,5	Campuran	2015	1	1.315.000	Warna Hitam	
15	02.06.03.05.03	Printer	17	Canon / Pixma G2000	A4	Campuran	2017	1	2.500.000		

16	02.06.03.05.03	Printer	18	Canon / Pixma G2000	A4	Campuran	2017	1	2.500.000	
17	02.06.03.05.03	Printer	19	Canon / Pixma G2000	a4	Campuran	2017	1	2.800.000	
18	02.06.03.05.03	Printer	24	HP / Color laser jet CP1515n	A4	campuran	2010	1	9.200.000	Printer Laser Jet Color
19	02.06.03.05.03	Printer	27	Canon / Pixma Inkjet iP 2770	A4	Campuran	2012	1	652.000	
20	02.06.03.05.03	Printer	28	Canon / Pixma Inkjet iP 2770	A4	Campuran	2012	1	652.000	
21	02.06.03.05.03	Printer	29	Canon / Pixma Inkjet MP287	A4	Campuran	2012	1	954.000	
22	02.06.03.05.03	Printer	31	Canon / Pixma MP 237	MP 237	Campuran	2015	1	1.100.000	Warna Hitam
23	02.06.03.05.03	Printer	34	Canon / Pixma ip 2770	IP 2770	Campuran	2015	1	700.000	Warna Hitam
24	02.06.03.05.04	Scanner	1	HP / Scanjet G 3110	A4	Campuran	2010	1	2.350.000	
25	02.06.03.05.11	UPS	10	ICA	CE 1200	Campuran	2015	1	1.500.000	Warna Hitam
26	02.06.03.05.11	UPS	11	ICA	CE 1200	Campuran	2015	1	1.500.000	Warna Hitam
27	02.06.03.05.11	UPS	9	ICA / CE 1200	P 40, L 15, T 20	Campuran	2015	1	1.500.000	Warna Hitam
28	02.06.03.05.12	Stabilizer/Stavolt	2	SVC / Flazer	1500 VA	Campuran	2012	1	513.167	
29	02.06.03.05.12	Stabilizer/Stavolt	3	SVC / Flazer	1500 VA	Campuran	2012	1	513.167	
30	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	10	Toshiba / Canvio	1 TB	Campuran	2015	1	1.400.000	Warna Hitam
31	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	6	Exfention / Hardisk Eksternal	1 TB	Campuran	2017	1	900.000	
32	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	7	Axioo / Hitam/ESAX250XU	1 TB	Campuran	2009	1	1.200.000	
33	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	8	Axioo / Hitam/ESAX250XU	1 TB	Campuran	2009	1	1.200.000	
34	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	9	Axioo / Hitam/ESAX250XU	1 TB	Campuran	2009	1	1.200.000	
J U M L A H									164.718.333	

**Tabel 2.4. DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PERALATAN DAN MESIN (AUDIO VISUAL)**

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	DATA PERALATAN DAN MESIN (AUDIO VISUAL)						
				Spesifikasi/Identitas Barang						Keterangan
				Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Asal usul	Harga Barang	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	2	Acer / X1185PG	220	Campuran	2017	1	4.500.000	
2	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	3	Toshiba / TLP-XC2008, Res. XGA	XC2008	campuran	2009	1	13.850.000	LCD Proyektor
3	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	1	Carol, UHF Dual Channel,	TS-3310A	Campuran	2012	1	1.660.000	Mic wireless
4	02.07.01.01.64	Power Amplifier	1	Emperor / -	2000 A	Campuran	2012	1	3.576.650	Power
5	02.07.01.01.83	Handycam	1	Sony / DCR-SR47, Tripot	SR47	campuran	2009	1	9.450.000	
6	02.07.01.01.83	Handycam	2	Canon / Legria FS 405	FS 405	Campuran	2013	1	4.200.000	
7	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	2	Letaec / Tripod	1,5 x 2	Campuran	2017	1	650.000	
8	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	3	Best / Digital, Automatic	/ 2 x 2 m, 70 inch,	campuran	2009	1	2.450.000	Overhead Projektor
9	02.07.01.01.89	Televisi	1	Telivisi layardatar	21 inc	campuran	2007	1	2.000.000	
10	02.07.01.01.89	Televisi	2	SHARP / Pico Slim, 21	21 inc	Campuran	2011	1	2.067.000	
11	02.07.01.01.91	Tripod Speaker	1	Thunder / -	TS-01Y-1	Campuran	2012	1	1.480.770	Speaker 3 tiang
12	02.07.01.01.91	Tripod Speaker	2	Thunder / -	TS-01Y-1	Campuran	2012	1	1.480.770	Speaker 3 tiang
13	02.07.01.01.93	VCD/DVD Player	1	DVD MP3	360K	campuran	2007	1	2.000.000	
14	02.07.01.01.95	Mixer Amplifier	1	Yamaha	12 channel	Campuran	2012	1	2.486.950	Mixer 12 channel
15	02.07.01.02.03	Camera Electronic	1	Canon / 3 x Optical	12 MP	campuran	2009	1	3.850.000	
16	02.07.01.02.03	Camera Electronic	2	Canon SLR / 1000 D Kit,	12 MP	campuran	2009	1	8.400.000	
17	02.07.01.02.03	Camera Electronic	3	Sony / DSC-W620 Camera	14,1 MP	Campuran	2013	1	2.300.000	

18	02.07.02.01.20	Facsimile	1	PANASONIC / KX-FT 983 CX -	FT 983 CX - W	Campuran	2014	1	1.904.650	
19	02.07.02.06.05	Wireless Portable (Sound System)	1	TOA / Wireles	MAX 20WATT	campuran	2007	1	7.500.000	
20	02.07.03.10.01	Antena SHF/Parabola Portable	1	Lokal / -	LNB 2	Campuran	2007	1	2.000.000	Digital parabola
J U M L A H									77.806.790	

**Tabel 2.5. DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PERALATAN DAN MESIN (ANGKUTAN)**

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	DATA PERALATAN DAN MESIN (ALAT ANGKUTAN)							Keterangan
				Spesifikasi/Identitas Barang							
				Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Asal usul	Harga Barang		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Daihatsu / TERIOS F 700 RG TX M/T	1495	Campuran	2008	2	166.500.000		
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	10	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	11	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	12	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	13	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	14	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	15	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	16	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
9	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	17	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
10	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	18	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
11	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	19	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	20	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	21	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
14	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	22	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
15	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	23	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
16	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	24	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		
17	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	25	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935		

18	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	26	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
19	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	27	Honda / Supra 125	125	campuran	2006	1	9.000.000	
20	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	28	Suzuki / FL 125 SD	125	Campuran	2008	1	14.981.923	
21	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	5	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
22	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	6	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
23	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	7	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
24	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	8	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
25	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	9	HONDA SUPRA X 125 Spoke F1 / AFX12U23C07 M/T	125	Campuran	2017	1	16.711.935	
J U M L A H									558.144.488	

Tabel 2.6. DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PERALATAN DAN MESIN (ALAT RUMAH TANGGA)

No	Kode Barang	Nama Barang	Register	DATA PERALATAN DAN MESIN (ALAT RUMAH TANGGA)						
				Spesifikasi/Identitas Barang						Keterangan
				Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	Asal usul	Harga Barang	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.05.02.01.05	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	1	Yamamax / Pro 6x26	60 ltr	Campuran	2017	1	3.004.545	Penyemprot Otomatis (Sprayer)
2	02.05.02.01.05	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	2	Yamamax / Pro 6x26	60 ltr	Campuran	2017	1	3.004.545	Penyemprot Otomatis (Sprayer)
3	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2	Brother / B-203	P 88, L 40, T 183	Campuran	2015	1	2.600.000	Warna Silver
4	02.06.01.04.01	Lemari Besi	3	Brother / B-203	P 88, L 40, T 183	Campuran	2015	1	2.600.000	Warna Silver
5	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	1	Brother / -	4 laci	Besi	2004	1	1.062.500	
6	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	10	Brother / -	4 laci	Besi	2013	1	2.000.000	
7	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2	Brother / -	4 laci	Besi	2004	1	1.062.500	
8	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	3	Brother / -	4 laci	Besi	2004	1	1.062.500	
9	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	4	Lion / -	4 laci	Besi	2006	1	1.710.000	
10	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	5	Daichi / 4 laci / Abu-abu	4 laci	Besi	2009	1	1.650.000	
11	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	6	Daichi / 4 laci / Abu-abu	4 laci	Besi	2009	1	1.650.000	
12	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	7	BROTHER / 4LACI	133(T) x 45,5(L) x 62(D)	Besi	2011	1	2.067.000	
13	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	8	Brother / -	4 laci	Besi	2013	1	2.000.000	
14	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	9	Brother / -	4 laci	Besi	2013	1	2.000.000	
15	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	1	Lokal / -	L 50, P 100	Stainless kaca	2007	1	800.000	Etalase sedang

16	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	2	Lokal / -	L 50, P 100	Stainless kaca	2007	1	800.000	Etalase sedang
17	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	3	Lokal / -	L 50, P 220	Stainless kaca	2007	1	2.500.000	Etalase besar
18	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	4	Lokal / Lokal/pintu2	170x120x45	Campuran	2012	1	1.096.000	
19	02.06.01.04.14	Lemari kayu	1	Lokal/kayu	80 x 45 x 178 cm	Kayu olahan	2002	1	2.250.000	Lemari Kayu
20	02.06.01.04.14	Lemari kayu	2	SOLID / 2 pintu kaca	80 x 45 x 178 cm	Kayu Partikel	2011	1	1.033.500	Lemari Arsip
21	02.06.01.04.14	Lemari kayu	3	SOLID / 2 pintu kaca	80 x 45 x 178 cm	Kayu Partikel	2011	1	1.033.500	Lemari Arsip
22	02.06.01.04.14	Lemari kayu	4	Lokal	80 x 45 x 178 cm	Kayu	2007	1	1.250.000	Penilaian 2015
23	02.06.01.04.14	Lemari kayu	5	Lokal	80 x 45 x 178 cm	Kayu	2007	1	850.000	Penilaian 2015
24	02.06.01.05.10	White Board	1	Lokal / Kayu Playwood	2,88 m2	Kayu	2009	1	950.000	
25	02.06.01.05.41	Genset	1	Yamaha / EF660 E / Biru / Besi	5000 watt	Campuran	2009	1	26.200.000	
26	02.06.01.05.43	Mesin Pompa Air	1	Shimizu	200wtt	Elektronik	2013	1	900.000	Mesin Pompa Air (pemakaman)
27	02.06.01.05.43	Mesin Pompa Air	2	Panasonic / GP- 200JXK	200wtt	Campuran	2011	1	650.000	
28	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	1	Lokal / Lokal/pintu2	170x120x45	Campuran	2012	1	2.634.000	Lemari arsip
29	02.06.02.01.04	Meja Kayu	10	Lokal / -	L.60,P 120	Camp	2004	1	650.000	Meja Kerja
30	02.06.02.01.04	Meja Kayu	14	Lokal / -	L.60,P 120	Camp	2007	1	650.000	Meja Kerja
31	02.06.02.01.04	Meja Kayu	15	Sucitra / -	1/2 biro	Camp	2007	1	637.500	Meja 1/2 Biro
32	02.06.02.01.04	Meja Kayu	17	Lokal / Prodesign	1/2 biro	Kayu	2013	1	750.000	Meja kerja
33	02.06.02.01.04	Meja Kayu	18	Lokal / Prodesign	1/2 biro	Kayu	2013	1	750.000	Meja kerja
34	02.06.02.01.04	Meja Kayu	19	Lokal / Prodesign	1/2 biro	Kayu	2013	1		Meja kerja
35	02.06.02.01.04	Meja Kayu	22	Saga	L.60,P 120	Campuran	2007	1	1.100.000	Penilaian 2015
36	02.06.02.01.04	Meja Kayu	23	Saga	L.60,P 120	Campuran	2007	1	1.100.000	Penilaian 2015
37	02.06.02.01.04	Meja Kayu	24	Saga	L.60,P 120	Campuran	2007	1	1.100.000	Penilaian 2015

38	02.06.02.01.04	Meja Kayu	25	Saga	L.60,P 120	Campuran	2007	1	1.100.000	Penilaian 2015
39	02.06.02.01.04	Meja Kayu	26	Lokal	L.60,P 120	Campuran	2007	1	1.100.000	Penilaian 2015
40	02.06.02.01.04	Meja Kayu	28	Active / MT Galant MTO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	975.000	Warna Coklat
41	02.06.02.01.04	Meja Kayu	29	Active / MT Galant MTO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	975.000	Warna Coklat
42	02.06.02.01.04	Meja Kayu	5	Uchiwa / -	L.60,P 120	Camp	2004	1	650.000	Meja Kerja
43	02.06.02.01.10	Meja Rapat	1	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
44	02.06.02.01.10	Meja Rapat	2	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
45	02.06.02.01.10	Meja Rapat	3	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
46	02.06.02.01.10	Meja Rapat	4	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
47	02.06.02.01.10	Meja Rapat	5	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
48	02.06.02.01.10	Meja Rapat	8	Active / Galant MKO 120	L 120, P 60, T 76	Campuran	2015	1	1.000.000	Warna Coklat
49	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	1	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
50	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	10	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
51	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	11	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
52	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	12	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
53	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	13	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
54	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	14	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
55	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	15	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
56	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	16	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
57	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	17	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
58	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	18	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
59	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	19	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)

[illegible]

82	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	4	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	
83	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	40	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
84	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	41	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
85	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	42	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
86	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	43	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
87	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	44	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
88	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	45	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
89	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	46	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
90	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	47	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
91	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	48	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
92	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	49	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
93	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	5	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
94	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	50	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
95	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	6	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
96	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	7	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
97	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	8	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
98	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	9	Lokal / -	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	besi busa synt	2008	1	273.000	Kursi Rapat (untuk Kabupaten)
99	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	3	Brother / G 4	G4	Besi	2013	1	1.800.000	Kursi tunggu/gandeng
100	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	4	Brother / G 4	G4	Besi	2013	1	1.800.000	Kursi tunggu/gandeng
101	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	5	Brother / G 4	G4	Besi	2013	1	1.800.000	Kursi tunggu/gandeng
102	02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	
103	02.06.02.01.37	Meja Komputer	2	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	

104	02.06.02.01.37	Meja Komputer	3	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	
105	02.06.02.01.37	Meja Komputer	4	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	
106	02.06.02.01.37	Meja Komputer	5	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	
107	02.06.02.01.37	Meja Komputer	6	Lokal / -	L 50, P 90	Kayu	2007	1	1.000.000	
108	02.06.02.01.37	Meja Komputer	7	Lokal	L 50, P 90	Kayu	2005	1	300.000	
109	02.06.02.01.37	Meja Komputer	8	Lokal	L 50, P 90	Kayu	2007	1	300.000	
110	02.06.02.01.37	Meja Komputer	9	Lokal	L 50, P 90	Kayu	2007	1	300.000	
111	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	1	Lokal / -	W 48 x D 48 x H 97-107cm	busa besi	2007	1	1.000.000	Kursi sekretaris
112	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	10	Isebel / T98H	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	Campuran	2013	1	500.000	
113	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	11	Isebel / T98H	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	Campuran	2013	1	500.000	
114	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	12	Isebel / T98H	P: 51 cm x L: 56 cm x T: 83 cm	Campuran	2013	1	500.000	
115	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	13	Rakuda	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2005	1	350.000	
116	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	14	Rakuda	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2005	1	350.000	
117	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	15	Isebel	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2006	1	500.000	Penilaian 2015
118	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	16	Isebel	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2006	1	500.000	Penilaian 2015
119	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	17	Isebel	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2006	1	500.000	Penilaian 2015
120	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	2	Indachi / -	W 48 x D 48 x H 97-107cm	busa besi	2007	1	1.000.000	Kursi sekretaris
121	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	26	Indachi	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2007	1	1.000.000	Penilaian 2015
122	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	27	Rakuda	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2005	1	350.000	
123	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	28	Isebel	230 x 66 x 77 cm.	Busa besi	2005	1	350.000	
124	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	3	Indachi / -	230 x 66 x 77 cm.	busa besi	2007	1	1.000.000	Kursi sekretaris
125	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	30	Frontine / EC 027	L 75, P 65, T 120	Campuran	2015	1	2.425.000	Warna Hitam

126	02.06.02.01.67	Gordyn	1	Lokal / Gorden + Tabir/Kain	263m	Campuran	2011	1	31.452.000	
127	02.06.02.01.69	Rak TV	1	Saga / -	L 50, P120	Campuran	2013	1	1.500.000	
128	02.06.02.03.02	Mesin Pel	1	Depo / 5071885	60ltr	Campuran	2017	1	1.000.000	Doublebucket 60 ltr/ tempat pel lantai
129	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	12	Tanaka / QUM 288	32 cc	Campuran	2017	1	4.900.000	Mesin Potong Rumput
130	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	13	Tanaka / QUM 288	32 cc	Campuran	2017	1	4.900.000	Mesin Potong Rumput
131	02.06.02.04.01	Lemari Es	2	Aqua / AQR-D240	220 Voll	Campuran	2017	1	3.300.000	Pengadaan Lemari Es/Kulkas
132	02.06.02.04.01	Lemari Es	3	Panasonic / 222 S-H	2 pintu	Campuran	2013	1	3.000.000	
133	02.06.02.04.03	AC Unit	1	Uchida / Spl[t MP S5EC	1/2PK	Campuran	2017	1	3.150.000	Pengadaan AC
134	02.06.02.04.03	AC Unit	2	Uchida / Spl[t MP S5EC	1/2PK	Campuran	2017	1	3.150.000	Pengadaan AC
135	02.06.02.04.04	AC Split	1	LG / -	795 w	campuran	2007	1	4.000.000	
136	02.06.02.04.04	AC Split	2	LG / -	795 w	campuran	2007	1	4.000.000	
137	02.06.02.04.04	AC Split	3	LG	1,5 PK, DI 1150 W	campuran	2010	1	5.600.000	AC untuk Ruang Aula Rapat
138	02.06.02.04.04	AC Split	5	LG / S12LFG	1,5 pk	Campuran	2012	1	5.423.000	
139	02.06.02.04.04	AC Split	8	Sharp / AH - A9MEY	50 HZ 220V	Campuran	2015	1	3.950.000	Warna Putih
140	02.06.02.04.04	AC Split	9	Sharp / AH- A9SEY	50 HZ 220V	Campuran	2015	1	5.000.000	Warna Putih
141	02.06.02.04.15	Showcase Display	1	Polytron / Roda bawah	180ltr	campuran	2010	1	4.400.000	
142	02.06.02.05.15	Dispenser	1	Miyako / -	100watt	Campuran	2012	1	933.000	
143	02.06.02.06.51	Tandon Air	1	Profil / Sedang	1200 ltr	Plastik	2012	1	1.500.000	Tandon Air
144	02.06.02.06.51	Tandon Air	2	Profil / Sedang	1200 ltr	Plastik	2012	1	1.500.000	Tandon Air
145	02.06.02.06.51	Tandon Air	3	Green	1200 liter	Campuran	2007	1	750.000	Penilaian 2015
146	02.06.02.06.58	Tong Sampah	1	Lion Star / Bundar	100ltr	Plastik	2017	1	950.000	Bak sampah besar
147	02.06.02.06.58	Tong Sampah	2	Lion Star / Roda	100ltr	Plastik	2017	1	700.000	Bak sampah beroda

148	02.06.02.06.58	Tong Sampah	3	Lion Star / Roda	100ltr	Plastik	2017	1	700.000	Bak sampah beroda
J U M L A H									220.491.090	

**TABEL : 27 DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
DATA GEDUNG DAN BANGUNAN**

No.	Uraian	Nomor		DATA GEDUNG DAN BANGUNAN								
				Konstruksi Bangunan		Luas Lantai/ Bngnan (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Status Tanah Bangunan	Asal Usul	Harga (Rp)	Ket
		Kode Brg	Reg	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	0001	Tidak	Beton	374	Jl. H. Boejasin Pelaihari Rt.2 Rw 1 Kel. Angsau. Kec. Pelaihari	31-12-2006	1	1	585.605.000	Kantor Ketahanan Pangan
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	03.11.01.10.01	0001	Tidak	Beton	144	Jl. A. Yan, Rt. 4. Rw 2 Kelurahan Angsau. Kec. Pelaihari	31-12-1980	1	2	173.968.000	Gedung Loka Bina Karya
3	Bangunan Parkir Semi Permanen	03.11.01.14.06	0001	Tidak	Beton	25	Jl. H. Boejasin Pelaihari Rt.2 Rw 1 Kel. Angsau. Kec. Pelaihari	20-06-2013	1	1	36.996.000	Pembangunan tempat parkir kendaraan roda 2
4	Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	0001	Tidak	Tidak	50	Jl. H. Boejasin Pelaihari Rt.2 Rw 1 Kel. Angsau. Kec. Pelaihari	31-12-2006	1	1	120.775.000	PAGAR
5	Kanopi	03.13.08.03.04	0001	Tidak	Tidak	36	Jl. H. Boejasin Pelaihari Rt.2 Rw 1 Kel. Angsau. Kec. Pelaihari	20-06-2013	1	1	14.576.000	Pembuatan Canopi untuk kendaraan roda 4
	JUMLAH										931.920.000	

Tabel 2.8. Ruangan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS RUANGAN	JMH	SATUAN	KONDISI
1.	Kepala Dinas	1	Ruang	Baik
2.	Sekretariat	1	Ruang	Baik
3	Kabid Pemberdayaan	1	Ruang	Baik bersatu dengan Kasi Pendampingan stimulan dan restorasi
4	Kabid rehabilitasi dan perlindungan jamsos	1	Ruang	bersatu dengan Kasi Perlindungan sosial korban bencana, kasi jaminan sosial keluarga dan kasi Rehabilitasi sosial.
5.	Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Cukup memadai bersatu dengan Verivikator, Pembantu Bendahara dan Bendahara gaji dan staf.
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Cukup memadai
7	Kasi Pemberdayaan masy.kelembagaan dan Restorasi sosial	1	Ruang	Baik berstu dengan Kasi Pendampingan stimulan dan restorasi
8	Kasi Identifikasi dan fakir miskin	1	Ruang	Bersatu dengan kasi pendampingan stimulant dan Restorasi
9	Bendahara	1	Ruang	Cukup memadai
10	Kamar mandi/ WC	2	Ruang	Kurang baik
11	Dapur	1	Ruang	Kurang baik
12	Ruang Rapat	1	Ruang	Cukup memadai

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan daerah yang membantu Bupati Tanah Laut dibidang Sosial, maka jenis dan obyek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah melaksanakan perencanaan, pemabngunan dan penanganan masalah sosial di Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Perencanaan jangka panjang (20) , jangka menengah (5) dan jangka pendek (tahunan), monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dibutuhkan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Tanah Laut. Bentuk /jenis layanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Pelayanan Sekretariat

Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.

2. Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

3. Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial

Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, adan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum.

Tabel T.C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINYA	TARGET RESTRA PERAGKAT DAERAH PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	SPM		100%	-	-	-	13.30 5	13.30 5	-	-	-	13.305	13.305	-	-	-	100%	100%
2	Jumlah keluarga miskin yang rumahnya direhabilitasi	SPM	150 KPM	150 KPM	-	-	-	-	150 KPM	-	-	-	-	150 KPM	-	-	-	-	100%
3	Jumlah bantuan stimulan UEP KUBE yang distribusikan	SPM	600 KPM	600 KPM	-	-	-	-	600 KPM	-	-	-	-	600 KP	-	-	-	-	100%
4	Jumlah Keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	SPM	240 ong	240 org	-	-	-	240 org	-	-	-	-	240 org	-	-	-	-	100%	-
5	Jumlah lembaga osial yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial -Orsos -Karang Taruna	SPM	100%	139 (3 Yayasan, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayasan, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayas an, 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayasan , 135 KT. Dan CSR)	139 (3 Yayasan , 135 KT. Dan CSR)
6	Jumlah peserta sarasehan tentang pelestarian nilai-	SPM	100%	450	250	230	230	300	300	250	230	230	300	300	250	230	230	300	300

	nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial																		
7	Jumlah situs perjuangan dan kepahlawanan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Jumlah PSM, TKSK dan Penyuluh Sosial yang aktif dan bersertifikat				39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
9	Jumlah data terpadu yang berhasil di update		100%	30.612	-	-	-	-	30.30 .612	-	-	-	-	25.432	-	-	-	25.432	25.432
10	Jumlah data PMKS yang divalidasi	SPM																	
11	Jumlah anak terlantar yang terampil	SPM						14	14	-	-	-	14	14	-	-	-		
12	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberikan pendidikan dan pelatihan	SPM						4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	4
13	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	SPM																	
14	Jumlah penyandang disabilitas berat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	SPM																	
15	Jumlah tuna sosial dan eks napi yang telah diberikan pendidikan dan keterampilan.		120	120	-	-	-												
16	Jumlah pengguna Napza yang tersosialisasi																		
17	Jumlah PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	SPM	100%	7.252	-	-	-	3.467	3.785	-	-	-	3.467	3.785	-	-	-	3.467	3.785

[illegible]

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

a). Tantangan

1. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jenis masalah yang meningkat kualitasnya berarti kedalaman dan dampak yang diakibatkan masalah tersebut cenderung berat. Secara kuantitas berarti masalah kesejahteraan sosial semakin bertambah baik jenis maupun jumlah penyandanganya.
2. Masalah utama yang paling menonjol adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena akan menimbulkan permasalahan lain seperti keterlantaran, rumah tidak layak huni, ketunaan, penyimpangan perilaku dan ketidakberdayaan.
3. Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah masalah kecacatan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan semakin maraknya anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Data PMKS yang belum valid dan belum terpadu sehingga masih banyak program dan kegiatan yang tidak tepat sasaran.

b) Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.

1. Ilmu pengetahuan, teknologi serta keraifan lokal. Kemajuan pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat.
2. Keberadaan organisasi sosial, relawan, LSM yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati Tanah Laut , dilakukan analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya kongkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kondisi yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya faktor- faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Faktor tantangan dan Faktor Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN 1. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/sataf 4. Adanya Renstra SKPD 5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 6. Kelembagaan organisasi yang optimal 7. Adanya beberapa perda tentang penanganan kemiskinan 8. Lingkungan kerja yang kondusif	KELEMAHAN 1. Belum validnya data base PMKS 2. Belum terisinya jabatan struktural 3. Belum optimalnya kerjasama lintas bidang 4. Belum integrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah sosial 5. Masih kuatnya ego sektoral bidang.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, Organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah kebawah, selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Tanah Laut telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu, namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain :

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas.
- b. Kegiatan dan bantuan serta jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain.
- c. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
- d. Peran Pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
- e. Peran serta masyarakat melalui organisasi dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.

- f. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
- g. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas, maka tantangan kedepan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh unit Sosial sampai terbentuknya Dinas Sosial 2017 secara umum masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif, kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kabupaten Tanah Lautdariberbagai permasalahan sosial di tingkatmikro. Berbagai permasalahan sosial yangberkembang di masyarakat sampai dengan awal tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 3.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2018

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	42
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	21
4	Anak Jalanan	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan(ADK)	194

6	Anak yang Menjadi Korban Tidak Kekerasan/diperlakukan salah	14
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0
8	Lanjut Usia terlanjar	3.156
9	Penyandang Disabilitas	1.486
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	0
14	Kelompok Minoritas	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	101
16	Orang dengan HIV/Aids (ODHA)	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	4
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	14
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0
21	Korban Bencana Alam	77
22	Korban Bencana Sosial	33
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	560
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	9
25	Fakir Miskin	5.135
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ialah ***Terwujudnya Tanah Laut yang “Berinteraksi” yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.***

Berdasarkan Visi Kabupaten Tanah Laut tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif.
3. Membangun tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait dengan misi ke-1 yaitu : ***Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.***

Selanjutnya penjabaran dari Misi I diatas dapat diuraikan dan sesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Berkarya untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dinas Sosial kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sehingga mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan kearifan local atau budaya setempat.

2. Berkarya untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial juga harus berkarya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PMKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan.

Kemajuan teknologi tentunya harus dimanfaatkan dalam system Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PMKS, Simtem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan system teknologi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut akan ***Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.***

Dengan indikator :

1. Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseleuruhan.
2. Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan renstra Kementerian Sosial. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Selain itu mencermati juga isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang semakin dinamis, kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam program Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan termasuk indikator, penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 **adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut yaitu dengan melaksanakan 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya Renstra Dinas Sosial Prov. Kalsel Tahun 2016 - 2021 32 maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan Penduduk maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

4. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
5. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai penjabaran visi dan misi Kementerian Sosial, maka tujuan akhir penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu

1. **Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar;**
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya;
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, yaitu :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan, dan PMKS Lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2018 melalui indikator :
 1. Persentase (%) Keluarga Miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 2. Persentase (%) Anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui indikator :
 - 2.1 Persentase (%) SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya.
 - 2.2 Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011-2031 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dalam kedudukan dari RTRW sebagai berikut:

- (1) Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat.
 - a. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan pedesaan terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.

- b. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- c. Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- d. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.
- e. Penetapan kawasan strategis dalam rangka peningkatan pengembangan Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mengemban tugas dan peranannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan, Hal ini tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Laut diatas, sehingga menuntut peran Bappeda Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Tanah laut tahun 2018-2023. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan pada RPJMD tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.
2. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
4. Terbatasnya pekerja sosial yang professional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
5. Pelayanan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi ketunaan, kerawanan, keterlantaran dan kemiskinan belum optimal.
6. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
7. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
8. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
9. Masih rendahnya pilar partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.

10. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PMKS yang berada di desa-desa.
11. Keberadaan PMKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS sehingga tidak jarang terdapat PMKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu : “Berinteraksi”. Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mewujudkan Misi No. 1, yaitu : ***Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.***

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, dengan **indikator** Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan.
- b. Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan **indikator** Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan.

2. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Tabel T-C. 25

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial berbanding dengan Jumlah PMKS keseluruhan	2%	2,50%	2,50%	3,50%	5%
2	Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang berkualifikasi terampil berbanding dengan jumlah PSKS keseluruhan	80%	85%	85%	90%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : *pertama*, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS; *kedua*, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; *ketiga*, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *keempat*, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian tersebut dilakukan dengan strategi-strategi pendekatan pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan Sosial

1. Memperkuat dan pengembangan berbagai pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil dan kelayakan serta bermanfaat berdasarkan prinsip berkeadilan dan manfaat;
3. Pemberdayaan sosial dilakukan secara terus menerus dengan pola penguatan kapasitas dan potensi diri sendiri dalam memecahkan masalah yang dialami;
4. Pemberian pelayanan dan bantuan stimulan serta penguatan permodalan usaha melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat lembaga keuangan mikro yang handal dan profesional;
5. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, satuan, bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

2.Strategi Kemitraan Sosial

1. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna mempercepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis;

2. Pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerja sama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang pasar dan usaha ekonomis produktif.

3. Strategis Partisipasi Sosial

1. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran serta inisiatif guna memecahkan persoalan kehidupan sosial di lingkungannya;
2. Partisipasi sosial dijadikan tanggung jawab sosial masyarakat agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat saling mendukung dan menguntungkan, sehingga dampak sosial atau kerentanan sosial di masyarakat bisa dikurangi;
3. Penguatan dan pelibatan aktif peran pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan berbagai masalah sosial melalui pelatihan-pelatihan dasar dan teknis.

4. Strategi Advokasi Sosial

1. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial Yang berpihak kepadapengakuan atas hak-hak dasar Warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial;
2. Penciptaan dan pembinaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya;

Lebih lanjut dalam rangka mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, perlu disusun dan ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi dapat tercapai dengan baik.

1. Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan, penyiapan dan perizinan usaha kesejahteraan sosial.

2. Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dimasyarakat dengan memprioritaskan pada upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana;
 - b. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemberian bantuan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi berbagai masalah sosial baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
3. Meningkatkan dukungan, bimbingan dan motivasi bagi PMKS baik secara individu, kelompok, keluarga, komunitas atau masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penguatan keterampilan teknis dan manajemen usaha;
5. Meningkatkan partisipasi, tanggung jawab sosial dan kepedulian dunia usaha dalam membantu memberikan bantuan dan menangani permasalahan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program pemberdayaan masyarakat (CSR);
6. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi lembaga sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS;
7. Memberikan bantuan stimulant atau usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial lainnya sesuai permasalahan dan kebutuhan PMKS.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : <i>Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dan Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</i></p>			
<p>Misi I : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS 2. Bimbingan dan Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin 3. Perluasan akses/jangkauan pelayanan kepada PMKS
<p>Misi II : Terwujudnya Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Memberikan Pendidikan dan Pelatihan 2.Pemberian insentif yang memadai 3.Sertifikasi bagi PSKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2019 tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kabupaten tanah laut Tahun 2019, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2019 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2019 terbagi 2 (dua) yaitu Program dan kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai Berikut :

A. Program Non-Urusan

B. Program Wajib/ Sosial

A. Program Non Urusan

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,00. kegiatan yang dilaksanakan untuk :

- Untuk jasa PDAM selama 12 bulan
- penerangan listrik selama 12 bulan
- Jasa telpon 12 bulan
- internet selama 12 bulan.

2) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.199.800,00 untuk pembayaran :

- Honorarium PA dan PPK
- Biaya pengadaan ATK,
- penjilidan dan
- penggandaan selama 1 tahun.

3) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan

- peralatan Kebersihan dan
- bahan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun.

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,00 untuk biaya perbaikan

- Perbaikan AC
- Komputer
- Laptop
- Printer

5) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.760.000. Kegiatan ini melaksanakan pembelian :

- pengadaan Alat Tulis Kantor untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kode Rekening)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000,00 Kegiatan ini melaksanakan pengadaan:

- Barang cetakan Kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran dan biaya penggandaan

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.200.000,00 untuk kegiatan belanja

- Alat Listrik dan
- Alat elektronik

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor sebanyak 25 buah

- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 108.630.000,00

9) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.900.000,00 untuk kegiatan

- rapat – rapat Staf

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar daerah dalam Provinsi

- Rapat koordinasi / konsultasi luar daerah dan dalam Provinsi

11) Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

- Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000,-

12) Penyediaan penunjang kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 324.000.000,- untuk pembayaran honorarium Pegawai tidak tetap dll :

- Tenaga Penjaga malam Kantor Dinas Sosial
- Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Sosial
- Tenaga penjaga malam pada Kantor Loka Bina Karya (LBK)
- Tenaga Kebersihan pada Kantor Loka Bina Karya (LBK)
- Tenaga Penjaga malam pada Gedung Juang Veteran
- Tenaga Operator SIMDA
- Tenaga Pengumpul Data calon penerima bantuan sosial (CPBS)
- Tenaga Operator data calon penerima bantuan sosial (CPBS)
- Tenaga kebersihan Tugu Palagan
- Tenaga kebersihan Taman Makam Pahlawan Bumi Tuntung Pandang
- Tenaga Penjaga malam Makam Pahlawan Bumi Tuntung Pandang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan DA.297 Rp. 38.610.000,-
- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 46.800.000,-

3. Program kerjasama Informasi dengan mas media

- Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Rp. 15.606.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- .Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun Rp. 6.298.500

B. Urusan Wajib

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

- Peningkatan kemampuan (capacity buillding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT daan PMKS lainnya PMKS lainnya Rp. 61.434.000,-
- Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) Rp.271.538,500,-
- Verifikasi dan Validasi data terpadu Rp. 281.984.000,-
- Pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin Rp. 236.195.000,-

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Rp. 145.606.700,-
- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasaranarehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Rp. 21.590.000,-

- Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.94.601.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi anak Terlantar sebanyak 20 orang anak terlantar

3. Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

- Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Penyandang Cacat untuk 95 orang
Rp. 158.522.500,-
- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma untuk 47 orang; Rp.,- 105.222.500,-

4. Program Pembinaan Panti Asuhan Jompo

- Pemenuhan Kebutuhan dasar lanjut usia terlantar untuk 252 orang
Rp. 342.542.500,-

5. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial untuk 40 orang
Rp.43.599.750,-

6. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat; untuk 33 orang (TKSK, PSM, KT) Rp. 233.574.900,-
- Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk 3 kali peretemuan Rp. 207.764.800,-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya Laporan Rencana Strategis ini yang memuat evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rangka peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai penutup, semoga Laporan ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



Ir. WIYANTO, M.Si
NIP. 19610313 199003 1 005